

Memberdayakan Sarjana Muslim Beretika dan Profesional Berlandaskan Nilai Islam dalam Masyarakat Global¹

Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A.

Guru Besar dan Wakil Rektor Bidang Akademik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendidikan tinggi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai institusi transmisi pengetahuan dan keterampilan teknis. Dalam konteks global yang ditandai oleh ketidakpastian, risiko sistemik, dan perubahan sosial yang cepat, pendidikan tinggi justru menjadi arena pembentukan karakter, orientasi nilai, dan makna hidup.

Gagasan John Dewey (1897) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri (*education is not preparation for life, education is life itself*) menegaskan bahwa proses pendidikan menyentuh dimensi etis dan eksistensial manusia. Karenanya, pendidikan dipahami sebagai ruang pembentukan makna, sikap, dan tanggung jawab, tidak terbatas pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis.

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan dalam tradisi Islam yang sejak awal menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan insan beradab dan paripurna (*al-insan al-kamil*), yakni manusia yang menyeimbangkan ilmu, akhlak, dan peran sosialnya. Keberhasilan pendidikan dipahami melalui keterpaduan antara capaian akademik, perkembangan profesional, kualitas moral, dan kontribusi nyata bagi kemaslahatan umat manusia.

Dalam kerangka tersebut, pendidikan tinggi Islam mengemban peran strategis dalam menyiapkan sarjana Muslim yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika masyarakat global.

¹ Disampaikan pada Wisuda Sarjana STAI Muslim Asia Afika, Ahad, 11 Januari 2026 di Ciputat.

Risalah ini berangkat dari kegelisahan atas semakin lebarnya jurang antara kemajuan profesional dan kedalaman etika dalam kehidupan modern. Banyak individu yang secara teknis kompeten, tetapi miskin orientasi nilai atau cerdas secara intelektual, namun rapuh secara moral.

Fenomena ini menuntut refleksi kritis atas orientasi pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi Islam, agar tidak terjebak pada pragmatisme sempit yang mengabaikan dimensi etika dan spiritual.

Krisis Etika Modern

Modernitas global membawa paradoks. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital membuka peluang besar bagi mobilitas sosial dan profesional. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut melahirkan bentuk-bentuk baru ketidakpastian, kecemasan, dan kerentanan.

Ulrich Beck (1986) memperkenalkan istilah *risk society* untuk menggambarkan suatu kondisi masyarakat modern yang secara struktural menghasilkan risiko sebagai konsekuensi inheren dari proses kemajuan itu sendiri. Dalam kerangka ini, risiko hadir dalam berbagai dimensi kehidupan, mencakup aspek ekologis dan ekonomi sekaligus menyentuh ranah etis serta eksistensial manusia.

Charles Taylor (1989) menggambarkan modernitas sebagai ruang yang mengalami *crisis of meaning*. Krisis ini merujuk pada situasi ketika manusia modern semakin terlepas dari kerangka nilai transenden, sehingga keberhasilan material tidak selalu menghadirkan pemenuhan makna hidup, ketenangan batin, dan kejelasan orientasi moral.

Dalam horizon pemikiran Islam, kesadaran atas kondisi tersebut sejatinya telah lama hadir melalui peringatan Al-Qur'an mengenai kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat perbuatan manusia sendiri, yang mencakup dimensi moral dan spiritual kehidupan.

Krisis etika ini berdampak langsung pada dunia kerja dan profesionalisme. Praktik manipulasi, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan struktural

kerap dibenarkan atas nama efisiensi dan persaingan. Dalam konteks inilah, lulusan perguruan tinggi, termasuk sarjana PTKI, dihadapkan pada pilihan-pilihan moral yang tidak selalu mudah. Pertanyaan fundamental yang muncul bukan sekadar “apa pekerjaan saya,” melainkan “nilai apa yang saya bawa dalam pekerjaan tersebut.”

Islam memandang kerja sebagai aktivitas bermakna yang menyatu dengan dimensi ibadah dan tanggung jawab moral. Konsep *niyyah* (niat) menempati posisi sentral dalam etika Islam, sebagaimana kaidah *al-umur bi maqashidihā* yang menegaskan bahwa setiap perbuatan ditentukan oleh tujuan dan orientasinya. Dalam kerangka ini, profesionalisme dipahami sebagai perwujudan etika kerja yang berlandaskan niat yang lurus, integritas moral, dan kesadaran tanggung jawab di hadapan Allah dan sesama manusia.

Pemikir besar Islam, al-Ghazali, mengingatkan bahwa ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kecerdikan yang menyesatkan, sementara akhlak tanpa ilmu akan menghasilkan kebaikan yang rapuh. Peringatan ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana keahlian teknis yang tinggi tanpa kendali moral justru berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang luas.

Islam menempatkan prinsip *amanah* dan *shidq* (kejujuran) sebagai fondasi utama dalam relasi sosial dan profesional. Kejujuran dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang bersifat vertikal kepada Allah Swt., sekaligus sebagai dasar kepercayaan dalam kehidupan bersama. Pemahaman ini memiliki korespondensi dengan etika deontologis dalam filsafat Barat, sebagaimana ditegaskan oleh Immanuel Kant (1785), bahwa kejujuran merupakan kewajiban moral yang melekat pada martabat manusia dan tidak bergantung pada pertimbangan kepentingan pragmatis.

Profesionalisme dalam Islam terwujud dalam konsep *itqan*, yakni bekerja secara sungguh-sungguh, berkualitas, dan bertanggung jawab. Nilai ini menuntut ketepatan waktu, ketelitian, kepatuhan pada aturan, serta komitmen pada mutu hasil kerja. Rasulullah Saw. menegaskan bahwa Allah mencintai hamba-Nya yang menyempurnakan pekerjaannya, sebuah pesan yang meneguhkan bahwa profesionalisme adalah bagian integral dari iman.

Dalam literatur manajemen modern, Peter Drucker (1967) menekankan bahwa profesional sejati ditandai oleh kompetensi sekaligus keterpercayaan (*trustworthiness*). Kepercayaan dipahami sebagai modal sosial yang tumbuh melalui konsistensi etika, integritas pribadi, dan tanggung jawab yang dijaga dalam jangka panjang. Pemaknaan ini berkelindan dengan konsep *amanah* dalam Islam, yang menempatkan kepercayaan sebagai nilai moral yang mengikat relasi sosial sekaligus sebagai tanggung jawab spiritual di hadapan Allah Swt.

Namun demikian, profesionalisme tanpa etika justru berpotensi melahirkan individu yang cerdas tetapi merugikan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme berisiko menjadi idealisme tanpa daya guna. Oleh karena itu, integrasi antara kompetensi profesional dan etika Islam menjadi prasyarat bagi terbentuknya sarjana Muslim yang relevan dan berdaya saing dalam masyarakat global.

Tantangan PTKI

Salah satu kritik paling tajam terhadap modernitas disampaikan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas (1978) melalui konsep *loss of adab*, yakni hilangnya keadaban sebagai akar krisis peradaban. Menurut al-Attas, ketika adab runtuh, ilmu kehilangan arah dan kemajuan berubah menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Pendidikan yang terlepas dari adab akan melahirkan individu-individu terdidik yang tidak lagi memiliki kompas moral.

Dalam konteks ini, pendidikan tinggi Islam memikul tanggung jawab untuk mengembangkan mutu kelembagaan sekaligus menjaga orientasi nilai dan misi etiknya. Upaya penguatan akreditasi, reputasi akademik, dan relevansi lulusan dengan dunia kerja ditempatkan dalam kerangka yang selaras dengan pembentukan integritas moral dan kepribadian keislaman.

Dengan orientasi tersebut, sarjana Muslim dipersiapkan sebagai agen moral yang memiliki kapasitas intelektual, kepekaan etis, serta keteguhan identitas dalam menavigasi kompleksitas kehidupan global.

Dalam perspektif sosiologi modern, ilmu pengetahuan dipahami sebagai bentuk *modal simbolik* yang memiliki daya legitimasi kuat dalam struktur sosial. Pierre Bourdieu (1979) menjelaskan bahwa modal simbolik memungkinkan pengetahuan dikonversi menjadi pengakuan, otoritas, dan status sosial yang berpengaruh dalam relasi kekuasaan.

Pemaknaan ini menemukan resonansinya dalam perspektif Islam yang menempatkan ilmu sebagai amanah bernilai luhur, yang legitimasi dan kehormatannya diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, nilai ilmu terletak pada kemampuannya menghadirkan manfaat sosial, keadilan, dan kebaikan bersama.

Ungkapan klasik *laysa al-'ilm ma hufizha wa lakinna al-'ilm ma nafa'* menegaskan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang memberi manfaat. Oleh karena itu, sarjana Muslim dituntut untuk hadir di tengah masyarakat sebagai pemecah masalah (*problem solver*), bukan sekadar pengamat kritis atau pencari keuntungan pribadi. Kontribusi sekecil apa pun, seperti: mengajar dengan jujur, melayani dengan tulus, dan memimpin dengan adil, merupakan bagian dari ibadah sosial yang bernilai tinggi dalam Islam.

Perbincangan mengenai sarjana Muslim yang beretika dan profesional berkelindan erat dengan dinamika globalisasi lanjutan yang kini memasuki fase disruptif teknologi dan transformasi sosial berskala luas. Globalisasi dimaknai tidak hanya sebagai keterbukaan pasar dan mobilitas tenaga kerja lintas negara, melainkan juga sebagai proses penetrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan sistem algoritmik ke dalam hampir seluruh ranah kehidupan profesional.

Perkembangan ini membentuk lanskap kerja dan relasi sosial yang semakin kompleks, sekaligus menghadirkan spektrum tantangan etika baru yang menuntut kepekaan moral, tanggung jawab sosial, dan kapasitas reflektif yang lebih mendalam dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Klaus Schwab (2016) menegaskan bahwa Revolusi Industri Keempat merupakan transformasi menyeluruh yang memengaruhi cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Transformasi ini menempatkan dimensi kemanusiaan, seperti

nilai keadilan, tanggung jawab moral, dan martabat manusia, sebagai elemen penting dalam menghadapi dominasi teknologi cerdas dan sistem otomatis.

Dalam lanskap tersebut, profesional Muslim beroperasi dalam lingkungan kerja yang ditandai oleh tuntutan efisiensi, kecepatan, dan pencapaian kinerja, yang secara bersamaan menuntut kemampuan menjaga empati, keadilan sosial, serta keberpihakan etis terhadap kelompok yang rentan sebagai bagian integral dari praktik profesional yang bermartabat.

Islam memberikan kerangka etik yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) menjadi dasar normatif dalam menilai penggunaan teknologi dan pengambilan keputusan profesional.

Dalam perspektif Islam, teknologi diposisikan sebagai sarana yang diarahkan oleh nilai dan tujuan kemanusiaan. Orientasi ini menuntut sarjana Muslim untuk menguasai perkembangan teknologi secara memadai sekaligus menumbuhkan landasan etika yang kokoh. Dengan bekal tersebut, kesiapan teknologi (*technology-ready*) berjalan seiring dengan keteguhan nilai moral (*ethically grounded*) dalam menjalankan peran profesional dan sosialnya.

Integritas Sarjana Muslim

Banyak lulusan perguruan tinggi Islam pada akhirnya akan memasuki ruang-ruang kepemimpinan, baik sebagai birokrat, akademisi, hakim, pendidik, profesional hukum, maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, dimensi etika kepemimpinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diskursus profesionalisme Muslim. James (1978) membedakan antara *transactional leadership* yang bertumpu pada pertukaran kepentingan dan *transformational leadership* yang berakar pada nilai, visi moral, dan perubahan bermakna.

Dalam Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ibn Taymiyyah menegaskan prinsip tersebut dengan menempatkan keadilan sebagai fondasi

keberlangsungan kekuasaan dan keteraturan sosial. Kerangka ini meneguhkan integritas sebagai inti kepemimpinan Muslim.

Dalam praktik profesional, pemegang posisi strategis dituntut menjaga keselarasan antara ucapan dan tindakan, antara komitmen publik dan pelaksanaan nyata, sebagai wujud tanggung jawab etis yang berkelanjutan.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi publik, integritas pribadi sarjana Muslim justru dapat menjadi sumber legitimasi sosial. Kepemimpinan yang berlandaskan etika tidak selalu menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi membangun kepercayaan jangka panjang yang jauh lebih berharga bagi keberlanjutan institusi dan masyarakat.

Penguatan etika profesional berkelindan erat dengan peran pendidikan tinggi Islam sebagai ruang pembentukan *habitus* etik yang berkelanjutan. Pendidikan dipahami sebagai proses yang membentuk cara berpikir, sikap, dan kebiasaan moral, selain mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan akademik.

Dalam kerangka pemikiran ini, Martha C. Nussbaum (2010) menegaskan pentingnya pendidikan yang menumbuhkan empati, kepekaan etis, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi kehidupan bersama. Orientasi tersebut memperkuat peran pendidikan tinggi Islam dalam menyiapkan lulusan yang memiliki kecakapan teknis, kematangan moral, dan kepekaan sosial sebagai satu kesatuan utuh dalam pembentukan kepribadian dan profesionalisme.

Kritik Nussbaum sejalan dengan pandangan Islam yang menolak reduksi manusia menjadi sekadar *homo economicus*. Pendidikan tinggi Islam perlu menempatkan etika bukan sebagai mata kuliah pelengkap, melainkan sebagai arus utama dalam keseluruhan proses akademik. Etika akademik, kejujuran ilmiah, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral harus menjadi budaya institusional, bukan sekadar wacana normatif dalam dokumen kurikulum.

Dengan pendekatan ini, sarjana Muslim dipersiapkan sebagai pribadi yang siap berkontribusi secara profesional sekaligus siap memikul tanggung jawab etis. Kesiapan

menghadapi dinamika pasar global berjalan seiring dengan kepekaan moral dalam mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan profesional yang diambil.

Dalam perspektif Islam, kerja profesional dipahami memiliki dimensi peradaban yang melekat pada tanggung jawab sosial dan moral. Profesionalisme menempati posisi strategis sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat yang adil dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan. Malik Bennabi (1949) menegaskan kerangka tersebut dengan menempatkan kualitas manusia dan sistem nilai sebagai fondasi utama kebangkitan umat. Dalam pandangan ini, kemajuan peradaban bertumpu pada integritas manusia yang bekerja secara profesional, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Profesional Muslim, baik sebagai dokter, dosen, hakim, ekonom, insinyur, birokrat, dan sebagainya, adalah aktor peradaban. Ketika profesionalisme dipadukan dengan etika, maka kerja sehari-hari berubah menjadi ibadah sosial yang berdampak luas. Sebaliknya, ketika nilai runtuh, maka keberhasilan personal kehilangan makna historis dan sosial. Dalam konteks ini, integrasi antara iman, ilmu, dan amal dipahami sebagai kebutuhan strategis yang menentukan keberlanjutan masyarakat global, sekaligus sebagai fondasi etis bagi pembangunan peradaban yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia dan dunia Muslim secara lebih luas, pemberdayaan sarjana Muslim beretika dan profesional merupakan kebutuhan strategis bangsa. Negara tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kali kekurangan orang pintar yang jujur, adil, dan berani menjaga nilai di tengah tekanan struktural dan budaya kompromi. Pendidikan tinggi Islam memiliki posisi kunci untuk menjawab kebutuhan ini secara sistemik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan etika profesional sarjana Muslim ditempatkan sebagai agenda akademik yang berkelindan erat dengan kepentingan kebangsaan dan kemanusiaan. Sarjana Muslim yang mengintegrasikan kompetensi profesional dengan integritas moral tumbuh sebagai aset sosial yang bernilai strategis bagi bangsa, agama, dan pembangunan peradaban global yang berkeadilan dan bermartabat.

Penutup

Pemberdayaan sarjana Muslim yang beretika dan profesional menjadi kebutuhan strategis dalam merespons tantangan masyarakat global yang terus berkembang. Integrasi antara ilmu pengetahuan, etika, dan iman diposisikan sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan peradaban dan ketahanan sosial. Dalam kerangka ini, Islam menawarkan sistem nilai yang komprehensif dan relevan untuk membentuk pribadi profesional yang memiliki kompetensi keilmuan, integritas moral, serta orientasi kuat pada kemaslahatan umat manusia.

Dalam dunia yang sarat kompromi, individu yang memegang prinsip justru akan dicari. Dalam situasi krisis makna, manusia yang hidup berlandaskan nilai akan tampil menenangkan. Oleh karena itu, sarjana Muslim harus tampil sebagai cahaya, yakni profesional yang dapat dipercaya, insan beradab yang membawa harapan, serta warga global yang tetap berpijak pada nilai-nilai luhur Islam. []